

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberitaan seputar pelaporan harta kekayaan pejabat negara masih menjadi pemberitaan hangat dalam pemberitaan di media *online*. Hal ini berkaitan dengan pelaporan kekayaan yang dilakukan pejabat negara dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen dalam penting dalam mencegah tindak pidana korupsi (Ariedwie, 2021). Media pun memiliki tugas utama sebagai pengawas atau *watchdog* yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melaporkan informasi seputar kinerja pemerintah berikut pertanggungjawabannya terhadap publik. Dalam kondisi normal maupun krisis, media pada umumnya berusaha untuk menginformasikan secara konsisten pertanggungjawaban pejabat publik dalam pelaporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu sumber utama dalam pemberitaan isu korupsi dan kekayaan harta pejabat negara yang melaksanakan upaya dalam pencegahan terjadinya tindak praktik korupsi dengan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Oleh karena itu, penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memperbaharui jumlah harta serta dari mana asal usul dari hartanya tersebut baik dalam keadaan normal maupun saat pandemi Covid-19. Di saat Pandemi Covid-19 diketahui bahwa KPK mencatat terdapat 70,3 persen harta kekayaan pejabat negara yang mengalami kenaikan selama setahun terakhir yang turut diberitakan oleh media massa (Muhtarom, 2021).

Pemberitaan mengenai isu kekayaan harta pejabat sebelum pandemi Covid-19 yang diberitakan oleh media massa yaitu mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam data terakhir KPK pada 31 Maret 2019 mendapatkan terdapat sebesar 74,39 persen tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN. Menurut Febri Diansyah selaku Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat

sekitar 250.000 lebih pejabat negara telah mengurus LHKPN dan sekitar 87.000 penyelenggara negara terdapat belum melaporkan harta kekayaan ke KPK (Rachman, KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Laporkan LHKPN Sebesar 74,39 Persen, 2019).

Namun, di sisi lain dalam keadaan krisis ekonomi disaat pandemi Covid-19, kekayaan harta pejabat negara yang diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa harta penyelenggara negara mengalami kenaikan 70,3 persen dalam setahun terakhir saat pandemi Covid-19, hal tersebut diketahui setelah KPK melakukan Analisa terhadap LHKPN selama setahun terakhir. Farkhan Evendi selaku Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) mengatakan bahwa disaat ini kondisi rakyat Indonesia yang mengalami masa sulit dan susah ekonomi, namun pejabat negara justru tambah kaya. Farkhan meminta kepada pemerintah dan pejabat untuk memperhatikan kondisi dari rakyat miskin selama pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, dengan mengungkapkan sumber kenaikan harta pejabat yang meningkat drastis tersebut selama pandemi Covid-19 untuk menghindari rasa kecewa rakyat kepada pemerintah (Aziz, 2021).

Isu kekayaan harta pejabat negara disorot secara khusus saat di masa pandemi Covid-19 oleh sejumlah media. Sebagian besar dari pemberitaan yang ada di media tersebut memberitakan mengenai peningkatan kekayaan pejabat negara dalam pelaporan hartanya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal tersebut terjadi di saat masyarakat sedang prihatin oleh krisis ekonomi karena pandemi. Sejumlah media yang tercatat membahas isu ini antara lain yaitu Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Sindonews.com, Tribunnews.com, Merdeka.com, dan Suara.com

Berdasarkan pengamatan tahap awal, tidak seluruh dari media di atas secara intens dalam memberitakan isu kekayaan pejabat negara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Pemberitaan isu kekayaan pejabat negara pada umumnya diberitakan saat pelaporan harta pejabat negara ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebelum pandemi berita isu kekayaan pejabat negara banyak didapati pada periode Februari - April 2019, karena pada tahun 2020 pemberitaan mengenai isu harta kekayaan pejabat sudah termasuk ke dalam masa pandemi Covid-19 yaitu KPK menghimbau para pejabat negara yang ingin melaporkan harta kekayaannya

untuk wajib lapor dengan memanfaatkan saluran tidak langsung demi menghindari kontak dekat dalam upaya mencegah penyebaran infeksi Covid-19 (Ramadhan, 2020). Sementara setelah pandemi pemberitaan serupa mengenai isu harta kekayaan pejabat negara muncul pada periode September - Desember 2021.

Beberapa media arus utama yang secara konsisten memberitakan isu harta kekayaan pejabat sebelum dan di masa pandemi sesuai kurun waktu di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Total Berita Harta Pejabat Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Media Online Nasional	Total Berita Harta Pejabat Sebelum Pandemi (Februari-April 2019)	Total Berita Harta Pejabat Saat Pandemi (September-Desember 2021)
Kompas.com	15 Berita	18 Berita
Tempo.co	14 Berita	16 Berita
Tribunnews.com	7 Berita	8 Berita
Sindonews.com	4 Berita	8 Berita
Detik.com	9 Berita	7 Berita
Merdeka.com	6 Berita	6 Berita
Suara.com	9 Berita	6 Berita

Sumber: Olahan Data Peneliti

Melalui data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa portal berita yang banyak memberitakan isu kekayaan harta pejabat sebelum dan selama pandemi Covid-19 secara konsisten adalah Kompas.com dan Tempo.co. Keduanya pun memiliki jumlah berita yang lebih banyak dibandingkan dengan portal berita lainnya. Sebagai media berita dengan nama besar dan reputasi baiknya dalam bidang jurnalistik, data yang didapat tersebut bukanlah temuan baru dan sangat wajar. Namun, menarik untuk melihat bagaimana kedua media dengan ideologi dan sikapnya pada pemerintahan saat ini melakukan tugas pengawasan pada pejabat publik melalui pemberitaan yang dilakukan. Bagaimana sikap kedua media melalui pbingkaihan yang dilakukan. Bagaimana sikap kedua media melalui pbingkaihan isu ini yang memiliki kecenderungan berbeda.

Pada penelitian ini akan menganalisis artikel yang ada pada media *online* Kompas.com dan Tempo.co di sebelum pandemi terdapat 5 artikel dari masing-masing media dan saat pandemi Covid-19 terdapat 8 artikel dari masing-masing media. Karena pada artikel tersebut, peneliti ingin melihat hasil pbingkaian yang dilakukan oleh kedua media dalam memberitakan pemberitaan isu kekayaan harta pejabat negara yang membahas kekayaan pejabat negara di lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemberitaan di portal berita Kompas.com dan Tempo.co.

Salah satu pemberitaan isu kekayaan pejabat sebelum pandemi dua mediapun memiliki nada berbeda dalam penulisan *headline* masing-masing. Salah satu berita pada portal berita Tempo.com menggunakan judul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa terdapat 56,32 persen anggota dari DPR RI yang sudah melaporkan harta kekayaannya (Hasyim, KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Lapor Kekayaan, 2019). Sementara salah satu berita pada portal berita Kompas.com menggunakan judul Kepatuhan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sebesar 74,39 persen. Sekalipun keduanya menyebutkan data yang dikutip dari sumber resmi pelaporan harta oleh LHKPN, namun judul yang digunakan Tempo menggambarkan kritik karena menggunakan kata baru 56,32% anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya, sementara Kompas cenderung lebih netral dengan menyebut tingkat kepatuhan pelaporan sebesar 74,39%.

Tabel 1.2 Artikel Berita Kompas.com dan Tempo.co Sebelum Pandemi Covid-19

No.	Artikel Kompas.com	Artikel Tempo.co
1.	KPK: Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Sebesar 74,39 Persen – 02 April 2019	KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Lapor Kekayaan – 01 April 2019



Gambar 1.1 Artikel Berita Kompas.com Sebelum Pandemi Covid-19 (Rachman, 2019).

### KPK Sebut Baru 56,32 Persen Anggota DPR Laporkan Kekayaan

Reporter: Irfyan Hasyim (Kontributor)

Editor: Juli Hantero

Senin, 1 April 2019 14:28 WIB



Gambar 1.2 Artikel Berita Tempo.co Sebelum Pandemi Covid-19 (Hasyim, 2019).

Kemudian, dalam pemberitaan mengenai isu kekayaan harta pejabat negara sebelum pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh media online Kompas.com dan Tempo.co. Dalam Kompas memberitakan isu tersebut dengan menonjolkan kepatuhan LHKPN penyelenggara negara yang sudah melapor dan belum melaporkan harta kekayaannya dengan kata-kata yang netral serta dalam penyajian *headline* dan foto yang digunakan sesuai dengan pemberitaan. Pada narasumber yang digunakan Kompas.com yaitu lebih dari satu narasumber langsung dalam pemberitaannya dari pihak KPK yang memiliki kredibilitas terhadap isu kekayaan pejabat negara.

Sedangkan, pada Tempo cenderung memberitakan isu tersebut dengan narasumber langsung yang memberi kritik dan opini dari pejabat pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai isu harta kekayaan penyelenggara negara dengan menggunakan kalimat pertanyaan dan ajakan pada *headline* serta menggunakan foto ilustrasi dalam pemberitaannya.

Sementara dalam pemberitaan mengenai pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di masa pandemi Covid-19 pada portal berita Kompas.com menekankan informasi yang menyebutkan bahwa KPK mengungkap 70,3 persen pejabat negara bertambah kaya selama pandemi Covid-19 yang diketahui setelah KPK melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir (Prabowo,

KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi, 2021). Sementara dalam pemberitaan isu harta pejabat terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di masa pandemi pada portal berita Tempo.co, salah satu *headline* menyebutkan bahwa Harta Pejabat Meningkat di saat Pandemi Covid-19, Pakar: Bahagia Di atas Derita Rakyat. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa para pejabat bertambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk (Persada, 2021). Berdasarkan penekanan yang ditunjukkan dalam dua media terdapat penekanan yang berbeda dalam menyajikan berita isu kekayaan harta pejabat. Pada Kompas lebih menonjolkan data dan nada kalimat yang netral, sementara pada Tempo cenderung menonjolkan pendapat pengamat dan menggunakan kalimat sindiran.

Tabel 1.3 Artikel Berita Kompas.com dan Tempo.co Saat Pandemi Covid-19

No.	Artikel Kompas.com	Artikel Tempo.co
1.	KPK Ungkap 70.3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi – 10 September 2021	Harta Pejabat Meningkat saat Pandemi, Pakar: Bahagia Di Atas Derita Rakyat – 12 September 2021



Gambar 1.3 Artikel Berita Kompas.com Saat Pandemi Covid-19 (Prabowo, 2021)



Gambar 1.4 Artikel Berita Tempo.co Saat Pandemi Covid-19 (Riana, 2021)

Pada media *online* Kompas.com dan Tempo.co saat pandemi Covid-19 memiliki jenis pemberitaan yang berbeda, dalam Kompas pemberitaan isu kekayaan pejabat negara diberitakan secara runtut dengan banyaknya kutipan sumber yang disajikan dan lebih dari satu narasumber dengan narasumber utama



dari pihak KPK yang memiliki kredibilitas terdapat dalam pemberitaan. Namun, dalam salah satu artikel dari Kompas.com terlihat terdapat narasumber tidak langsung terhadap isu kekayaan pejabat negara. Berbagai pemberitaan yang ada pada Kompas lebih menekankan nada kalimat yang netral pada *headline* yang ditampilkan dengan menggunakan foto yang sesuai dengan isi pemberitaan. Sedangkan, pada Tempo cenderung lebih kritis dalam memberitakan isu tersebut dengan kutipan sumber yang sedikit dengan hanya terdapat satu narasumber. Salah satunya dengan menggunakan narasumber dari Analisis Sosial Politik yang memiliki kredibilitas terkait isu kekayaan pejabat negara dalam pemberitaannya, pada *headline* pemberitaan Tempo lebih menonjolkan jumlah harta kekayaan serta terdapat pendapat analis sosial politik dengan menggunakan kalimat sindiran dan pada foto yang digunakan dalam pemberitaan menggunakan ilustrasi.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, dapat terlihat perbedaan dalam pernyataan sikap kedua media mengenai isu kekayaan pejabat dengan Kompas yang lebih mendukung terhadap isu kekayaan harta pejabat negara dengan kata-kata yang netral dan kutipan sumber yang banyak serta hanya terdapat satu narasumber dan penggunaan foto dan kalimat yang memiliki kesetaraan dengan informasi yang disampaikan. Sementara, pada Tempo lebih mengkritisi dengan kata-kata sindiran dan kutipan sumber yang cenderung sedikit serta terdapat lebih dari satu narasumber. Kemudian, foto yang digunakan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Sekalipun kedua media memiliki komitmen yang sama dalam fungsi pengawasan media terhadap pemerintah khususnya terkait isu korupsi dan kekayaan pejabat. Sehingga menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan kedua media membingkai isu harta pejabat sebelum pandemi dan di masa pandemi dengan analisis *framing*.

Melalui analisis *framing*, penelitian ini selanjutnya ingin melihat pola pada pemberitaan isu kekayaan pejabat pada portal berita Kompas dan Tempo sebelum pandemi Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19. Metode *framing* yang digunakan adalah *Framing Zhongdang Pan* dan *Gerald M. Kosicki*. Kekhasan dari model ini adalah *framing* sebagai cara untuk mengetahui bagaimana suatu media mengemas sebuah berita dan mengkonstruksi realitas melalui kata, kalimat, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain untuk melihat pemaknaan

media sehingga dapat dipahami oleh khalayak. Dengan menggunakan sejumlah perangkat analisis antara lain yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Penelitian pertama berjudul “Analisis *Framing* Model Robert Entman Tentang Pembertiaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia.com” yang ditulis oleh Intan Leliana, Herry, Panji Suratradi, dan Edward Enrieco pada tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis *framing* Model Robert Entman dengan hasil bahwa media Kompas.com dan BBCIndonesia.com memberikan ruang informasi dan klarifikasi bagi pemerintah dan Lembaga KPK untuk melakukan segala upaya penertiban dan penganggulan masalah korupsi dana bansos Covid-19.

Penelitian kedua, berjudul “Analisis *Framing* tentang Penyitaan Harta Irjen Djoko Susilo oleh KPK di Surat Kabar JawaPos dan Kompas periode 12 Maret sampai 19 Maret 2013” yang ditulis oleh Trisnani Herdiyanti pada tahun 2013 dengan menggunakan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan hasil bahwa surat kabar JawaPos lebih menekankan frame asset-aset milik Djoko Susilo yang disita oleh KPK dan memberitakan tentang sikap negatif dari Irjen Djoko Susilo. Sedangkan pada Kompas lebih menceritakan adanya sanksi-sanksi yang terkait kasus tersebut.

Penelitian ketiga berjudul “Komitmen Pemberantasan Korupsi Dalam Liputan Media” yang ditulis oleh Ihsanira Dhevina Enggarratri dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman dengan hasil penelitian yang menunjukkan dengan adanya dominasi dalam liputan yang menunjukkan adanya sebuah hambatan atau kurangnya komitmen terhadap gerakan anti korupsi oleh penyelenggara negara. Hal tersebut membuat KPK sering terlihat berkerja sendiri dalam upayanya untuk mengambat pemberantasan korupsi.

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya ada pada isu pemberitaan dan pemilihan media berita. Berdasarkan seluruh pemaparan di atas penelitian ini mengangkat topik pembingkaiian pemberitaan isu harta kekayaan pejabat sebelum dan di masa pandemi Covid-19.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pembingkai Pemberitaan Isu Harta Kekayaan Pejabat sebelum pandemi periode Februari – April 2019 dan di masa Pandemi Covid-19 periode September – Desember 2021 Antara Kompas.com dan Tempo.co?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembingkai Pemberitaan Isu Harta Kekayaan Pejabat sebelum pandemi periode Februari – April 2019 dan di masa Pandemi Covid-19 periode September – Desember 2021 Antara Kompas.com dan Tempo.co.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
  - a. Untuk memperkaya penelitian Komunikasi khususnya pada analisis teks pada portal berita *online* dengan menggunakan metode Framing.
  - b. Dapat menjadi sebuah rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan mengangkat topik mengenai pemberitaan isu kekayaan pejabat negara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi referensi bagi jurnalis mengenai kecenderungan pembingkai media pada isu harta pejabat negara di masa krisis.
  - b. Dapat memberikan sebuah wawasan bagi pembaca mengenai pemberitaan di media *online* serta fungsi media sebagai *watchdog* pada pemerintah di masa Pandemi Covid-19.